

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
DOLOKSANGGUL
2021**

KATA PENGANTAR

Renstra SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 telah dapat disusun dan diharapkan dapat dipergunakan sebagai dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan peternakan dan perikanan strategis yang akan diacu oleh berbagai pihak termasuk sektor swasta dan lintas sektor dalam pembangunan peternakan dan perikanan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan kurun waktu 2021-2026.

Renstra SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026, mempedomani Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peernakan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 2020-2024.

Oleh karena itu besar harapan kami, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang di rencanakan dalam Renstra ini dapat menjadi acuan sekaligus sebagai tolak ukur kinerja bagi semua pihak, sehingga Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan lima tahun kedepan mampu diwujudkan yang pada akhirnya menjadikan Kabupaten Humbang Hasundutan mampu menjadi Kabupaten yang berdaya saing dan sejahtera sesuai Visi Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026.

Akhir kata, kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini belumlah mencapai titik sempurna, untuk itu saya ingin semua pihak dapat memberikan masukan, sehingga kedepannya Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan 2021-2026 ini dapat lebih baik dan fokus efektif dan efisien. Semoga seluruh daya upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima Kasih.

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**



**PARNAN LUMBAN GAOL, ST
PEMBINA
NIP. 19720314 200312 1 002**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program dan kegiatan pembangunan bidang peternakan dan perikanan untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Renstra OPD ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan baik Renstra, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan dan Rencana Kerja OPD.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Secara astronomis Kabupaten Humbang Hasundutan terletak pada garis 2°1'-2°28' Lintang Utara dan 98°10'-98°58' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki batas-batas : Utara-Kabupaten Samosir, Timur-Kabupaten Tapanuli Utara, Selatan-Kabupaten Tapanuli Tengah, Barat-Kabupaten Pakpak Bharat. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Humbang Hasundutan berada di bagian tengah wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan ketinggian antara 330-2.075 m diatas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan 251.765,93 Ha, dengan luas daratan sebesar 250.271,02 Ha atau 99,40% dan luas danau sebesar 1.494,91 ha atau 0,6%. Kemiringan tanah yang tergolong datar hanya 11 %, landai sebesar 20% dan miring/terjal 695. Iklim di Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk tropis basah dengan suhu berkisar antara 17°C-29°C.

Sesuai kondisi alamnya, wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan wilayah yang kaya sumber daya air dan sumber lahan, dimana selain memiliki Danau Toba juga terdapat kolam, rawa dan beberapa aliran sungai yang cukup panjang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan. Dalam mendukung pengembangan perikanan di daerah ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan berbagai upaya, diantaranya pengembangan budidaya perikanan dan pengembangan perikanan tangkap.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan menyusun Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan dan bersifat indikatif yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang peternakan dan perikanan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari disusunnya dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan periode tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan formal Organisasi Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembangunan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
9. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) ;

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor 5) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Nomor 18);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Dokumen Renstra yang disusun dimaksudkan sebagai arah kebijakan dan target pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Humbang Hasundutan selama periode tahun 2021-2026, yang tetap mengacu pada tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan OPD dengan sasaran yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026. Dengan tersusunnya Renstra ini, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan, Dinas Peternakan dan Perikanan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian yang mencakup peternakan dan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Disnakkan ;
- b. Pelaksanaan DPA Disnakkan;
- c. Penyusunan kebijakan bidang peternakan dan perikanan ;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan perikanan ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan perikanan ;
- f. Pelaksanaan administrasi bidang peternakan dan perikanan ;
- g. Perumusan kebijakan bidang peternakan dan perikanan ;
- h. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan;
- i. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian serta penyediaan benih/bibit ternak, ikan dan pakan ternak ;
- j. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan ;
- k. Pelaksanaan penyuluhan bidang peternakan dan perikanan ;
- l. Pemberian rekomendasi teknis bidang peternakan dan perikanan ;
- m. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan ikan ;
- n. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat peternakan dan perikanan ;
- o. Pelaksanaan administrasi Disnakkan ;
- p. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya ;
- q. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Disnakkan.

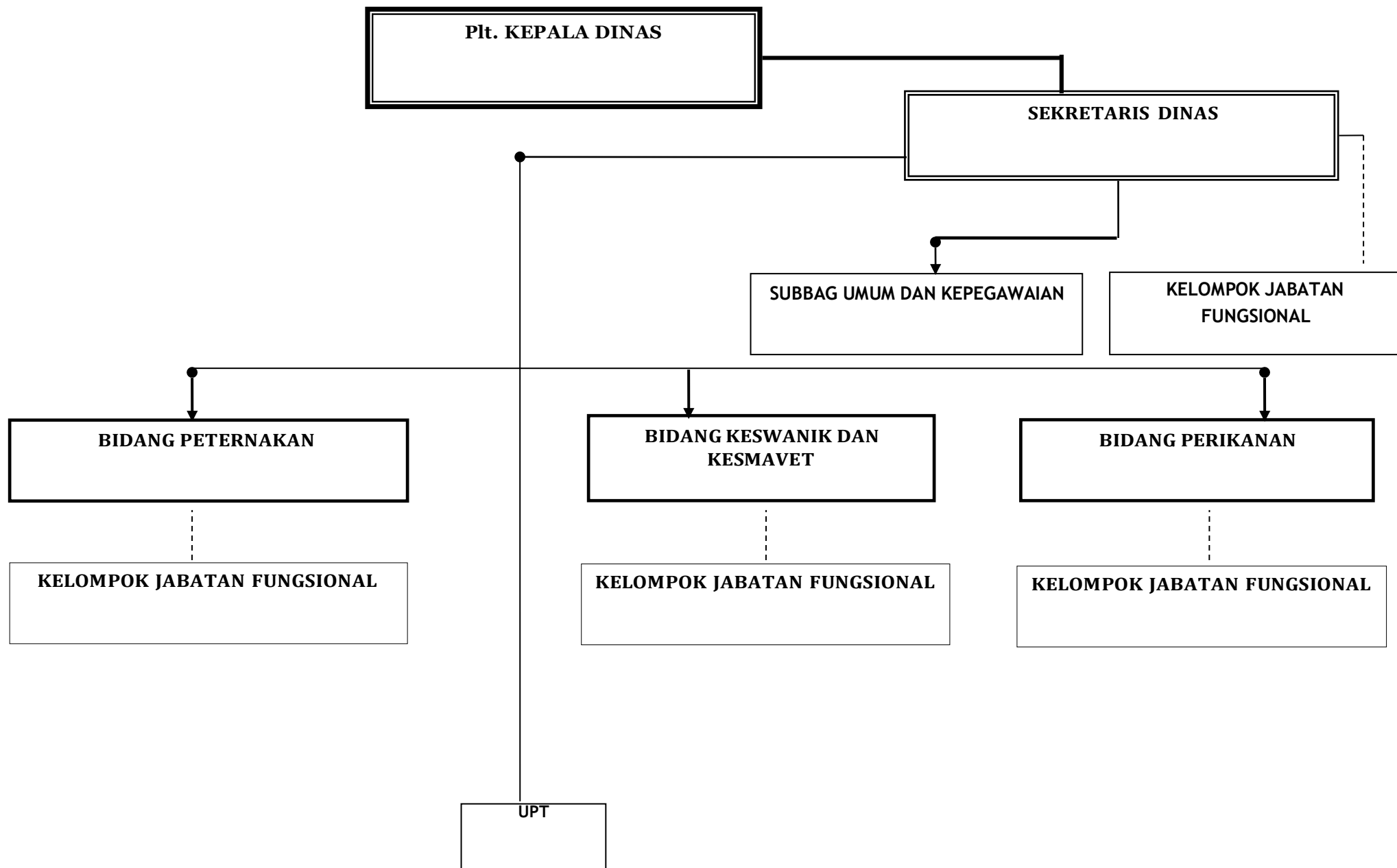
Sedangkan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Peternakan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional.
- d. Bidang Kesehatan hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner terdiri dari kelompok jabatan fungsional.
- e. Bidang Perikanan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 2) sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 4 (empat) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, serta 8 Jabatan Fungsional yang terdiri dari dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu direncanakan sesuai dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Salah satunya dapat dilihat dari komposisi pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan pendidikan. Jumlah pegawai berlatar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, diharapkan dengan komposisi tersebut dapat memberikan andil yang cukup besar dalam peningkatan kinerja organisasi. Pada Tabel 2.1 dapat dilihat komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, dari 27 orang pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 66,67% atau 18 orang dan pegawai perempuan sebanyak 33,33 % atau 9 orang.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretariat	3	5	8
3	Bidang Peternakan	5	1	6
4	Bidang Perikanan	4	2	6
5	Bidang Keswanik dan Kesmavet	6	2	8
	Jumlah Total	19	10	29

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, tersebar dari jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Sarjana (S1) yang didominasi oleh lulusan Sarjana (S1) sebesar 80% atau 23 orang.

Rincian jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	Pendidikan			
	S1	D3	SMA	Jumlah
Kepala Dinas	1	-	-	1
Sekretariat	4	-	4	8
Bidang Peternakan	5	-	1	6
Bidang Perikanan	6	-	-	6
Bidang Keswanik dan Kesmavet	8	-	-	8
Jumlah Total	24	-	5	29

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan golongan/ruang, yaitu golongan IV sebanyak 9 orang, golongan III sebanyak 15 orang dan golongan II sebanyak 4 orang.

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Unit Kerja	Gol/Ruang								
		IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	1	-	2	-	1	1	3	-	-
3	Bidang Peternakan	-	-	3	-	1	1	1	-	-
4	Bidang Perikanan	-	2	3	-	-	1	-	-	-
5	Bidang Keswanik dan Kesmavet	-	5	1	-	2	-	-	-	-
	Jumlah Total	1	8	9	-	4	3	4	-	-

Selain pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dinas Peternakan dan Perikanan juga memiliki Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jumlah 9 orang dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, yang terdiri dari Penyuluh Perikanan Bantu sebanyak 2 orang, Petugas Penjaga Air BBI Pusuk I sebanyak 1 orang, Petugas Balai Benih Ikan Pusuk I sebanyak 2 orang, Petugas Unit Pembibitan Peternakan Pusuk I sebanyak 1 orang,

Petugas Rumah Potong Hewan Doloksanggul sebanyak 1 orang dan Juru Sembelih Halal sebanyak 1 orang dan Petugas Kebersihan Dinas Peternakan dan Perikanan sebanyak 1 orang. Sehingga total jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan berjumlah 40 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Adapun sarana / prasarana yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Jeep	1 unit	√	-	-
2	Pick Up	1 unit	√	-	-
3	Mobil Unit Kesehatan Hewan	1 unit	√	-	-
4	Sepeda Motor	18 unit	18 unit	-	-
5	Genset	2 unit	√	-	1 unit
6	Brankas	1 unit	√	-	-
7	Traktor	1 unit	√	-	-
8	Bak Fiberglass	5 unit	√	-	-
9	Bak Air	1 unit	√	-	-
10	Mesin Pembersih Kandang	1 unit	√	-	-
11	Mesin Tik	8 unit	4 unit	-	4 unit
12	Kalkulator	8 buah	4 buah	-	4 buah
13	Filling Besi	19 unit	19 unit	-	-
14	Lemari kaca	1 unit	-	√	-
15	Lemari kayu	11 unit	10 unit	-	1 unit
16	Alat Penghancur Kertas	1 unit	√	-	-
17	Meja	54 unit	46 unit	-	8 unit
18	Kursi	79 unit	70 unit	-	9 unit
19	Sofa	1 set	√	-	-
20	Mesin Potong Rumput	2 unit	-	-	√
21	Lemari Es	13 unit	√	-	-
22	P.C. Unit	14 unit	4 unit	-	10 unit
23	Lap Top	18 unit	14 unit	-	4 unit
24	Printer	25 unit	6 unit	-	19 unit
25	Camera	6 unit	5 unit	-	1 unit
26	Mikroskop	3 unit	√	-	-
27	Proyektor	1 unit	√	-	-

28	Facsimile	1 unit	√	-	-
29	Freezer	1 unit	-	-	√
30	Cooler Box	23 unit	√	-	-
31	White Board	1 unit	√	-	-
32	Dispenser	3 unit	√	-	-
33	Jam Dinding	9 unit	√	-	-
34	Tabung Gas	2 unit	√	-	-
35	Jangka Sorong Manual	10 buah	√	-	-
36	Handsprayer	1 buah	√	-	-
37	Container Besar IB	1 unit	√	-	-
38	Setrika	3 buah	√	-	-
39	Gordyn	3 set	√	-	-
40	Tangga Lipat Aluminium	1 unit	√	-	-
41	Kompor Gas	2 unit	√	-	-
42	Rice Cooker	2 unit	√	-	-
43	Televisi	3 unit	√	-	-
44	Tabung Oksigen	2 unit	√	-	-

1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan dapat diukur berdasarkan target Renstra OPD dan realisasi capaiannya selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Capaian Kinerja PD berdasarkan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan dan Review Renstra Tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Tahun 2020 :

Capaian kinerja pada Tahun 2020 bidang peternakan telah sesuai dengan misi keempat yakni Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan dengan hasil meningkatnya pendapatan masyarakat/peternak melalui program dan kegiatan yang bertujuan dalam peningkatan populasi ternak.yang terdiri dari ternak babi, kerbau, sapi, kuda, ayam dan itik.

Perkembangan Populasi Ternak dari Tahun 2016-2020.

Populasi Ternak Tahun 2016 sebanyak 325.071 ekor, terdapat peningkatan Populasi Ternak sebesar 0,6 % Tahun 2017 menjadi 327.026 ekor.

Populasi Ternak Tahun 2018 terdapat penurunan populasi sebesar 1,7% menjadi 321.548 ekor. Penurunan Populasi Ternak pada komoditi ternak kuda, ayam buras, kambing dan ternak itik.

Populasi Ternak Tahun 2019 terdapat penurunan populasi sebesar 5.4% menjadi 304.142 ekor. Penurunan Populasi Ternak pada komoditi ternak babi, kuda, ayam buras, kambing dan ternak itik.

Populasi Ternak Tahun 2020 terdapat penurunan populasi sebesar 8.2% menjadi 279.123 ekor. Penurunan Populasi Ternak pada komoditi ternak babi, kuda, ayam buras, kambing dan ternak itik.

Secara umum perkembangan Populasi Ternak per komoditi dari Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:

a. Ternak Sapi

Secara umum perkembangan ternak sapi dari tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.Pada Tahun 2016 Populasi Ternak sebanyak 1.370 ekor. Pada Tahun 2017 terdapat

peningkatan populasi sebesar 5% menjadi 1.440 ekor, Pada Tahun 2018 terdapat peningkatan populasi sebesar 3% menjadi 1.483 ekor, Pada Tahun 2019 terdapat peningkatan populasi sebesar 10% menjadi 1.627 ekor dan Pada Tahun 2020 terdapat peningkatan populasi sebesar 5% menjadi 1.701 ekor.

Peningkatan populasi ini disebabkan oleh adanya Bantuan Ternak Sapi kepada Kelompok Tani dan Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) pada Ternak Sapi.

b. Ternak Kerbau

Secara umum perkembangan ternak kerbau dari tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 Populasi Ternak sebanyak 11.085 ekor. Pada Tahun 2017 terdapat peningkatan populasi sebesar 2% menjadi 11.260 ekor, Pada Tahun 2018 terdapat peningkatan populasi sebesar 1% menjadi 11.371 ekor, Pada Tahun 2019 terdapat peningkatan populasi sebesar 3% menjadi 11.736 ekor dan Pada Tahun 2020 terdapat peningkatan populasi sebesar 3% menjadi 12.088 ekor.

Peningkatan populasi ini disebabkan oleh adanya Bantuan Ternak Kerbau kepada Kelompok Tani dan Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) pada Ternak Kerbau.

c. Ternak Kuda

Secara umum perkembangan ternak kuda dari tahun 2016-2020 menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 Populasi Ternak sebanyak 450 ekor. Pada Tahun 2017 terdapat penurunan populasi sebesar 8% menjadi 413 ekor, Pada Tahun 2018 terdapat penurunan populasi sebesar 9% menjadi 376 ekor, Pada Tahun 2019 terdapat penurunan populasi sebesar 15% menjadi 318 ekor dan Pada Tahun 2020 terdapat penurunan populasi sebesar 5% menjadi 303 ekor.

Penurunan populasi ini disebabkan oleh tingginya permintaan daging kuda pada masyarakat yang berakibat pada tingginya angka pemotongan ternak. Minimnya animo masyarakat/peternak dalam pengembangbiakan ternak kuda berakibat pada menurunnya angka populasi ternak kuda.

d. Ternak Kambing

Secara umum perkembangan ternak kambing dari tahun 2016-2020 menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 Populasi Ternak sebanyak 2.074 ekor. Pada Tahun 2017 terdapat penurunan populasi sebesar 1% menjadi 2.045 ekor, Pada Tahun 2018 terdapat penurunan populasi sebesar 3% menjadi 1.986 ekor, Pada Tahun 2019 terdapat penurunan populasi sebesar 3% menjadi 1.919 ekor dan Pada Tahun 2020 terdapat penurunan populasi sebesar 6% menjadi 1.809 ekor.

Penurunan populasi ini disebabkan oleh tingginya permintaan daging kambing pada saat Perayaan Hari Raya Idul Adha yang berakibat pada tingginya angka pemotongan ternak kambing. Minimnya animo masyarakat/peternak dalam pengembangbiakan ternak kambing berakibat pada menurunnya angka populasi ternak kambing.

e. Ternak Domba

Populasi Ternak Domba pada Tahun 2019 sebanyak 45 ekor. Pada Tahun 2020 terdapat peningkatan populasi sebesar 42% menjadi 64 ekor. Peningkatan populasi ini disebabkan oleh

perkembangan ternak yang dipelihara oleh masyarakat/peternak dan Bantuan Ternak Domba kepada Kelompok Tani.

f. Ternak Babi

Secara umum perkembangan ternak babi dari tahun 2016-2018 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 Populasi Ternak sebanyak 36.554 ekor. Pada Tahun 2017 terdapat peningkatan populasi sebesar 5% menjadi 38.373 ekor, Pada Tahun 2018 terdapat peningkatan populasi sebesar 3% menjadi 39.524 ekor.

Pada Tahun 2019 terdapat penurunan populasi sebesar 28% menjadi 28.272 ekor dan Pada Tahun 2020 terdapat penurunan populasi sebesar 62% menjadi 10.619 ekor.

Penurunan populasi ternak babi Tahun 2019-2020 ini disebabkan mewabahnya Penyakit African Swine Fever (ASF) yang diperkirakan terjangkit pada bulan agustus 2019 menyerang ternak babi di Kabupaten Humbang Hasundutan yang berakibat pada tingginya kasus kematian massal ternak babi.

g. Ternak Ayam Buras (Ayam Kampung)

Populasi Ternak Ayam Buras (Ayam Kampung) pada Tahun 2016 sebanyak 241.650 ekor. Pada Tahun 2017 terdapat peningkatan populasi sebesar 0.5% menjadi 242.855 ekor.

Populasi Ternak Ayam Buras (Ayam Kampung) pada Tahun 2018 terdapat penurunan populasi sebesar 3% menjadi 236.552 ekor. Pada Tahun 2019 terdapat penurunan populasi sebesar 2% menjadi 231.609 ekor. Pada Tahun 2020 terdapat penurunan populasi sebesar 3% menjadi 225.524 ekor.

Penurunan populasi Ayam Buras (Ayam Kampung) Tahun 2018-2020 ini disebabkan mewabahnya Penyakit New Castel Deases (ND) pada beberapa daerah yang berakibat pada tingginya kasus kematian massal ternak Ayam Buras (Ayam Kampung). Dengan merebaknya kasus African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi mengakibatkan tingginya permintaan daging ternak Ayam Buras (Ayam Kampung) pada masyarakat yang berakibat tingginya angka pemotongan ternak sehingga menurunkan angka populasi ternak Ayam Buras (Ayam Kampung).

h. Ternak Itik/Itik Manila

Secara umum perkembangan ternak itik/itik manila dari tahun 2016-2020 menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 Populasi Ternak sebanyak 31.178 ekor. Pada Tahun 2017 terdapat penurunan populasi sebesar 2% menjadi 30.640 ekor, Pada Tahun 2018 terdapat penurunan populasi sebesar 1% menjadi 30.286 ekor, Pada Tahun 2019 terdapat penurunan populasi sebesar 6% menjadi 28.617 ekor dan Pada Tahun 2020 terdapat penurunan populasi sebesar 6% menjadi 27.015 ekor.

Penurunan populasi ini disebabkan oleh tingginya permintaan daging itik pada masyarakat yang berakibat pada tingginya angka pemotongan ternak. Minimnya animo masyarakat/peternak dalam pengembangbiakan ternak itik/itik manila berakibat pada menurunnya angka populasi ternak itik/itik manila.

Untuk peningkatan kesehatan hewan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya adalah pelaksanaan pendataan Hewan Penular Rabies dengan data yang didapat pada tahun 2016 ada sebanyak 15.427 ekor yang terdata dengan jumlah setiap tahun mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan yaitu pada tahun 2020 jumlah yang terdata adalah sebanyak 14.927 ekor. Kegiatan pelaksanaan kegiatan vaksinasi pada Tahun 2016 dilaksanakan di 10 kecamatan dengan

jumlah tervaksin sebanyak 12.630 ekor dengan jumlah setiap tahun mengalami fluktuasi dikarenakan pelaksanaan vaskinasi khusus untuk penyakit New Castle Disease pada ternak unggas menurun dikarenakan anemo masyarakat untuk vaksinasi unggas sangat sedikit tampak pada Tahun 2020 jumlah hewan yang tervaksin adalah 8.483 ekor.

Untuk mengetahui tingkat kekebalan pasca vaksinasi dan surveillance penyakit Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan pengambilan sampel darah maupun organ, pada Tahun 2016 jumlah sampel yang fdiambil adalah 60 sampel kemudian mengalami kenaikan pada Tahun 2019 sebanyak 114 sampel sedangkan pada Tahun 2020 sampel yang diperiksa mengalami penurunan kembali yaitu sebanyak 76 sampel. Kegiatan Pelaksanaan Pengobatan Pada Tahun 2017 sebanyak 7.540 ekor, Pada Tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 9.793 ekor sedangkan Pada Tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah hewan/ternak terobati hanya mencapai 3.818 ekor dikarenakan adanya wabah Covid-19.

Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner ada kegiatan Monitoring Peredaran dan Pengawasan daging, Ikan dan Produk Olahannya dengan melakukan pengambilann sampel daging untuk diperiksa ke Balai Veteriner Medan yaitu sebanyak 42 sampel daging, dengan jumlah pedagang yang dimonitoring ada sebanyak 164 pedagang dan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan hewan Qurban Pada Tahun 2016 sebanyak 40 ekor, Tahun 2017 sebanyak 62 ekor dan pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 195 ekor.

Untuk produksi ikan pada Tahun 2017 sebesar 1,276.18 ton yang terdiri dari Produksi Tangkap sebesar 102.48 ton dan Produksi Budidaya sebesar 1,173.70 ton mengalami peningkatan dibandingkan dengan produksi Tahun 2016 sebesar 1,052.60 ton. Pada Tahun 2018 produksi ikan sebesar 1,479.8 ton yang terdiri dari Produksi Tangkap sebesar 136,1 ton dan Produksi Budidaya sebesar 1,343.70 ton , produksi perikanan Tahun 2019 sebesar 1,623.22 ton yang terdiri dari Produksi Tangkap sebesar 145,60 ton dan Produksi Budidaya sebesar 1,477.60 ton, Tahun 2020 produksi perikanan sebesar 1,737.36 ton yang terdiri dari Produksi Tangkap sebesar 100,45 ton dan Produksi Budidaya sebesar 1,636.91 ton. peningkatan produksi ini disebabkan meningkatnya hasil produksi Keramba Jaring Apung dari Perairan Danau Toba. Untuk target produksi perikanan Tahun 2021 adalah sebanyak 1,585 ton.

TABEL T-C.23

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke -			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peternakan													
	Populasi Ternak													
	Kerbau (ekor)		12.100	12.705	11.685	12.002	11.260	11.371	11.736	12.088	93,06	89,50	100,44	100,72
	Sapi potong (ekor)		1.413	1.483	1.548	1.613	1.440	1.483	1.627	1.701	101,91	100	105,10	105,46
	Babi (ekor)		45.393	47.663	40.147	40.858	38.373	39.524	28.272	10.619	84,54	82,92	70,42	25,99
	Ayam Buras (ekor)		264.749	277.986	243.887	251.326	242.855	236.522	231.609	225.524	91,73	85,08	94,97	89,73
	Itik (ekor)		40.930	42.977	32.589	34.915	30.640	30.286	28.617	27.015	74,86	70,47	87,81	77,37
	Produksi Perikanan													
	Perikanan tangkap (ton)		174,19	164,19	149,70	164,7	102,48	136,1	145,60	100,45	58,83	82,89	97,2	60,9
	Perikanan budidaya (ton)		1.051,15	1.441,27	1.483,10	1.609,6	1173,70	1343,70	1477,60	1636,91	111,66	93,23	99,63	101,69

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengembangan peternakan dan perikanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait pengembangan peternakan dan perikanan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pembangunan peternakan dan perikanan sering mengalami permasalahan-permasalahan yang menghambat pengembangannya dan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan. Tantangan ini dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak dan berat untuk diselesaikan tanpa kerjasama semua pihak, baik dari pemerintah dan masyarakat. Dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat pun sangat penting bagi pembangunan yang lebih menyeluruh (*holistic*), terintegrasi, dan terarah.

Tantangan pada pembangunan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Rendahnya SDM petani peternak dan pembudidaya ikan dalam manajemen dan pelaksanaan peternakan, kesehatan hewan dan perikanannya;
2. Peternak dan pembudidaya ikan di Kabupaten Humbang Hasundutan masih didominasi usaha skala kecil;
3. Pemanfaatan lahan untuk peternakan dan perikanan masih terbatas;
4. Sistem upah untuk usaha budidaya masih rendah;
5. Harga produk ternak yang relatif fluktuatif;
6. Kenaikan harga produksi tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan ternak/ikan;
7. Petani Peternak belum melaksanakan sepenuhnya anjuran dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit hewan dalam kegiatan usaha peternakan dan perikanannya;
8. Terdapatnya tempat pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemerintah Daerah, sehingga tidak terpantaunya proses pemotongan hewan dan tidak dilakukannya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang menjamin bahwa daging yang dihasilkan memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi;

9. Masih adanya gangguan penyakit hewan yang menyebabkan terhambatnya pencapaian produksi peternakan, dengan penyakit yang dominan yaitu cacingan (sapi dan Kerbau), scabies (sapi, kerbau dan babi), *Newcastle Disease* (ND) dan ngorok (CRD) pada ternak unggas serta Penyakit African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi.
10. Adanya Zero Keramba dimana Budidaya ikan di Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba harus dihapus (ditiadakan) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Danau Toba dan Sekitarnya bahwa Kecamatan Baktiraja dinyatakan daerah zero keramba, hal tersebut mengakibatkan penurunan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 70 %. untuk mengatasi ini, maka potensi perikanan darat harus dikembangkan.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan ke depan sebagai berikut :

1. Kondisi geografis dan keadaan sosial masyarakat Humbang Hasundutan yang masih cenderung agraris. Namun potensi sumber daya peternakan dan perikanan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan belum dimanfaatkan secara optimal;
2. Tersedianya teknologi peternakan dan perikanan
Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang peternakan dan perikanan membuka peluang dan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi dan pelayanan. IPTEK mempunyai peranan penting dalam pengembangan kualitas SDM peternakan dan perikanan yang mempengaruhi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi terutama menggerakkan industri peternakan dan perikanan serta pengembangan pasca panen.
3. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat
Keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan juga sangat ditentukan oleh adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat yang merupakan implementasi dari kebijakan paradigma pembangunan yang partisipatif yaitu dari , oleh dan untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Humbang Hasundutan cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari peranan swadaya masyarakat dalam pembiayaan pembangunan di bidang peternakan dan perikanan antara lain terbentuknya kelompok-kelompok peternakan, kelompok-kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang setiap tahunnya terus bertambah/meningkat dari jumlah maupun kualitasnya.
4. Program Nasional Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan
Dengan dijadikannya Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai salah satu daerah Program Nasional Food Estate dalam menunjang Ketahanan Pangan Nasional menjadi peluang bagi pengembangan sektor peternakan. Adanya integrasi Sektor Pertanian dengan Peternakan menjadi peluang pengembangan ternak di Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir yang akan menjadi dasar penyusunan rencana strategis dinas dalam menentukan target dan capaian kinerja dinas dalam lima tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan

Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Peternakan dan Perikanan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Humbang Hasundutan .

Permasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal. Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui secara rinci dapat dijabarkan dalam Tabel 3.1 berikutini.

Tabel 3.1
Permasalahan-permasalahan Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Produksi ternak dan ikan	Belum mampunya produksi ternak dan ikan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat	1. Terbatasnya sarana dan prasarana peternakan 2. Sebagian besar sistem pemeliharaan masih didominasi oleh peternak/pembudidaya kecil dengan SDM dan permodalan yang masih rendah
2	Terbatasnya ketersediaan bibit ternak unggul, Benih Ikan dan sumber bahan pakan ternak	Minimnya ketersediaan bibit ternak unggul, benih ikan dan sumber bahan pakan	1. Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk pengembangan usaha peternakan dan perikanan 2. Belum adanya UPTD Pembibitan Ternak Unggul
3	Masih adanya gangguan penyakit hewan yang menyebabkan terhambatnya pencapaian produksi peternakan dan perikanan	Masih tingginya kasus kematian ternak yang diakibatkan serangan penyakit seperti ASF, Hog Cholera, ND, dll	1. Belum optimalnya layanan kesehatan hewan terutama dalam melakukan pelayanan publik yang lebih baik, mudah dan cepat 2. Belum ditemukannya obat/vaksin dalam penanganan penyakit tertentu 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan kesehatan hewan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan yang dituangkan dalam strategi pembangunan jangka menengah daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 – 2025. Kajian arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah berupa tahapan pembangunan berdasarkan skala prioritas atau proses pembangunan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD ditujukan untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan relevansinya dengan rencana jangka menengah daerah yang akan disusun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. Adapun Visi Kabupaten Humbang Hasundutan adalah **“HUMBANG HASUNDUTAN MAJU DAN BERMENTALITAS UNGGUL”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Misi untuk mendukung visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal
4. Mewujudkan infrastruktur yang berasaskan kebermanfaatan dan pemerataan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang peternakan dan perikanan serta tugas pembantuan, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Disnakkan;
2. Pelaksanaan DPA Disnakkan;
3. Penyusunan kebijakan bidang peternakan dan perikanan;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan perikanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi bidang peternakan dan perikanan;
7. Perumusan kebijakan bidang peternakan dan perikanan;
8. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan;
9. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian serta penyediaan benih/bibit ternak/ikan dan pakan ternak ;
10. Pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
11. Pelaksanaan penyuluhan bidang peternakan dan perikanan;
12. Pemberian rekomendasi teknis bidang peternakan dan perikanan;
13. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan ikan;

14. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat peternakan dan perikanan;
15. Pelaksanaan administrasi Disnakan;
16. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
17. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan.

Secara umum tugas Dinas Peternakan dan Perikanan terkait dengan pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 3 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu:

“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal”

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah di sektor peternakan dan perikanan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Humbang Hasundutan yang dikaitkan dengan visi dan misi ke-3 pembangunan jangka menengah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sasaran : Meningkatnya pendapatan masyarakat

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Peternakan dan Perikanan secara vertikal berada dibawah 2 kementerian dan 2 dinas provinsi, yaitu Kementerian Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk urusan pertanian (subsektor peternakan), Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara untuk urusan kelautan dan perikanan.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Perikanan Republik Indonesia

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong””. Untuk mencapai visi tersebut ada 3 misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni: Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan dan Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, yakni: Optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap, Meningkatnya mutu, daya saing dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan, Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dan Optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yaitu optimalnya konservasi dan keanekaragaman hayati.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan Meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

Strategi pembangunan kelautan dan perikanan dalam mencapai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat ;
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan ;
4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
6. Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab ;
7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
8. Tatakelola pemerintahan yang baik.

Sinergitas pembangunan nasional khususnya di sektor perikanan dan kelautan sejalan dengan pembangunan di daerah. Hal ini terlihat dapat dilihat dari keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan perikanan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran strategis pembangunan perikanan khususnya dalam rangka peningkatan produksi hasil perikanan.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Pertanian adalah “**Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modren untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.**”

Sedangkan Misi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kedaulatan Pangan;
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Prasarana Kementerian Pertanian.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan pangan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian yang sesuai kebutuhan;
5. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
6. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
7. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
8. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

3.3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan dan berpedoman kepada hasil kajian lingkungan strategis (KLHS) RPJMD. KLHS diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 IV-39 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Menurut PP No. 46 Tahun

2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pasal 13 ayat 1,

KLHS memuat enam aspek meliputi :

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

KLHS yang bersifat strategik menghasilkan rekomendasi untuk penyempurnaan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026. Implementasi KLHS diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan 319 indikator, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi :

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun;
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan;
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia;
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk semua;
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan;
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan;
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua;
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk semua; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 ;
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi;
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar negara;
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan;
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan;
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya;
14. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim;

15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati;
16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan;
17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian nasional akan dapat tercapai ketika mendapat dukungan sinergitas pembangunan pertanian yang sejalan di daerah. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi daging sebagai salah satu komoditi di sektor peternakan maka pembangunan sektor peternakan sangat sejalan dengan arah pembangunan peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan sasaran strategis peningkatan produksi hasil produksi peternakan.

Faktor- faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L adalah :

1. Rendahnya SDM petani peternak dan pembudidaya ikan dalam manajemen dan pelaksanaan peternakan, kesehatan hewan dan perikananannya;
2. Kuantitas dan kualitas SDM aparat belum maksimal;
3. Peternak dan pembudidaya ikan di Kabupaten Humbang Hasundutan masih didominasi usaha skala kecil;
4. Pemanfaatan lahan untuk peternakan dan perikanan masih terbatas;
5. Sistem upah untuk usaha budidaya masih rendah;
6. Harga produk ternak yang relatif fluktuatif;
7. Kenaikan harga produksi tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan ternak/ikan;
8. Petani peternak belum melaksanakan sepenuhnya anjuran dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit hewan dalam kegiatan usaha peternakan dan perikananannya;
9. Terdapatnya tempat pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemerintah Daerah, sehingga tidak terpantaunya proses pemotongan hewan dan tidak dilakukannya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang menjamin bahwa daging yang dihasilkan memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi;
10. Masih adanya gangguan penyakit hewan yang menyebabkan terhambatnya pencapaian produksi peternakan, dengan penyakit yang dominan yaitu cacangan pada sapi, scabies pada ternak kerbau, sapi dan babi dan *newcastle disease* (ND), ngorok (CRD) pada unggas;
11. Kurangnya pengetahuan dan penerapan teknologi peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
12. Kurangnya ketersediaan bibit ikan, ternak unggul dan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
13. Belum adanya Master Plan pengembangan ternak dan perikanan;
14. Sistem logistik kegiatan budidaya ternak/ikan belum tertata dengan baik dan efisien;

15. Sarana dan prasarana pendukung peternakan, kesehatan hewan dan perikanan masih terbatas;
16. Belum optimalnya layanan Kesehatan Hewan terutama dalam melakukan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bemutu;
17. Belum tertatanya manajemen pelayanan kesehatan hewan yang baku;
18. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan hewan.

1.4. Penentuan Isu-Isu Strategi

Isu strategis merupakan suatu keadaan yang berpotensi menjadi masalah ataupun menjadi peluang yang berorientasi pada masa depan. Isu strategis selain sebagai suatu keadaan yang belum menjadi masalah saat ini tetapi dapat berpotensi untuk menjadi masalah di masa depan, juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola yang mana jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Perangkat daerah harus memperhatikan dan mengedepankan isu strategis dalam perencanaan pembangunan mengingat dampaknya yang signifikan di masa datang.

Memperhatikan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan yang ditinjau terhadap capaian Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan periode sebelumnya, maka diperoleh isu strategis Dinas Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:

“PRODUKSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN YANG BELUM OPTIMAL”

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan

Penetapan tujuan organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor – faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, karena dengan mengetahui faktor – faktor kunci keberhasilan berarti organisasi tersebut telah mengetahui kekuatan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan.

Dalam rangka pencapaian Visi “ Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul” yang dijabarkan dalam Misi Ketiga yaitu “Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pertanian yang berkelanjutan, ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal”, maka tujuan pembangunan yang ditetapkan adalah : ” Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat ”

Sedangkan tujuan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :

” Meningkatkan Produksi Peternakan dan Perikanan”

Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas peternakan dan perikanan;
2. Meningkatnya Populasi Ternak ;
3. Meningkatnya Usaha Perikanan.

Kesesuaian Visi, Misi RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan menentukan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam visi misi Bupati terpilih. Adapun konsistensi tersebut dapat dijabarkan Tabel T-C. 25 berikut:

Tabel T-C.25 . Konsistensi Visi, Misi RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran PD

No	VISI : Mewujudkan Humbang Hasundutan Yang Maju Dan Bermentalitas Unggul									
	Misi	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif dengan Memanfaatkan SDA dan Kearifan Lokal	Meningkatnya Produksi Peternakan dan Perikanan	Meningkatnya populasi ternak	Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%)	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
			Meningkatnya Usaha Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	5	5	5	5	5	5

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. STRATEGI

Strategi merupakan cara atau langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Strategi adalah respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu genetik ternak;
2. Peningkatan sarana dan prasarana peternakan;
3. Peningkatan lahan HPT (Hijauan Pakan Ternak);
4. Konsolidasi dengan peternak dalam hal manajemen pengelolaan ternak dan kesehatan ternak;
5. Memberi kesempatan peningkatan kompetensi SDM;
6. Penerapan IPTEK dalam pengembangan peternakan;
7. Menjalin kerjasama sektoral dan lintas sektoral;
8. Peningkatan mutu genetik ikan;
9. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan;
10. Peningkatan skala usaha perikanan.
11. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan formal dan informal bagi aparatur dan pembudidaya ikan

4.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan cara atau operasional dari Strategi. Dari strategi di atas Dinas Peternakan dan Perikanan menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Mendatangkan ternak yang memiliki genetik yang unggul;
2. Penerapan teknologi perbaikan genetik;
3. Pengenalan jenis ternak hasil dari rekayasa genetik;
4. Mengalokasikan peralatan dalam pengembangan produksi peternakan;
5. Pengembangan areal peternakan;
6. Pengenalan jenis HPT kepada masyarakat;
7. Ekstensifikasi areal penanaman HPT;
8. Menyebarkan informasi penanganan ternak baik pengelolaan dan kesehatannya;
9. Fasilitasi peningkatan kualitas kelembagaan tani;

10. Fasilitasi Aparatur dalam penyerapan informasi terbaru;
11. Fasilitasi peternak dalam penyerapan informasi baru tentang peternakan;
12. Fasilitasi Aparatur dalam perencanaan dan penyerapan pelaksanaan IPTEK;
13. Pembuatan MoU;
14. Mendatangkan bibit ikan yang memiliki genetik yang bersertifikat;
15. Penerapan teknologi perbaikan genetik;
16. Pengenalan jenis ikan hasil dari rekayasa genetik;
17. Mengalokasikan peralatan dalam pengembangan produksi perikanan;
18. Pengembangan areal perikanan;
19. Pemberian bantuan untuk meningkatkan skala usaha perikanan;
20. Pemerluasan lahan perikanan;
21. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan , pelatihan, magang,bimtek dan pembinaan mendukung pembangunan kelautan dan perikanan dan peternakan.

Tabel TC 26 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan			
VISI : Mewujudkan Humbang Hasundutan Maju dan bermentalitas Unggul			
MISI : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif dengan Memanfaatkan SDA dan Kearifan Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya produksi peternakan dan Perikanan	1. Meningkatnya Populasi Ternak	1 Peningkatan mutu genetik ternak	<ul style="list-style-type: none"> - Mendatangkan ternak yang memiliki genetik yang unggul - Penerapan teknologi perbaikan genetik - Pengenalan jenis ternak hasil dari rekayasa genetic
		2 Peningkatan sarana dan prasarana peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengalokasikan peralatan dalam pengembangan produksi peternakan - Pengembangan areal peternakan
		3 Peningkatan lahan HPT (Hijauan Pakan Ternak)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan jenis HPT kepada masyarakat - Ekstensifikasi areal penanaman HPT
		4 Konsolidasi dengan peternak dalam hal manajemen pengelolaan ternak dan kesehatan ternak	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebarkan informasi penanganan ternak baik pengelolaan dan kesehatannya - Fasilitasi peningkatan kualitas kelembagaan tani

		5 Memberi kesempatan peningkatan kompetensi SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Aparatur dalam penyerapan informasi terbaru - Fasilitasi peternak dalam penyerapan informasi baru tentang peternakan
		6 Penerapan IPTEK dalam pengembangan peternakan	Fasilitasi Aparatur dalam perencanaan dan penyerapan pelaksanaan IPTEK
		7 Menjalin kerjasama sektoral dan lintas sektoral	Pembuatan MoU
	2.Meningkatnya Usaha Perikanan	1. Peningkatan mutu genetik ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendatangkan bibit ikan yang memiliki genetik yang bersertifikat - Penerapan teknologi perbaikan genetic - Pengenalan jenis ikan hasil dari rekayasa genetik
		2 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengalokasikan peralatan dalam pengembangan produksi perikanan - Pengembangan areal perikanan
		3 Peningkatan skala usaha perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan untuk meningkatkan skala usaha perikanan - Pemerluasan lahan perikanan
		4 Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan formal dan informal bagi aparatur dan pembudidaya ikan	Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan , pelatihan, magang,bimtek dan pembinaan mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang telah dibuat terarah dan jelas disertai indikator yang meliputi indikator program dan indikator kegiatan, indikator dan output memberikan gambaran yang jelas tentang program dan kegiatan menghasilkan keluaran yang bermanfaat, saling terkait dan efektif.

Program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun akan menjadi acuan bagi Dinas Peternakan dan Perikanan dalam menyusun rencana tahunan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan. Penyusunan perencanaan yang berdasarkan indikasi diharapkan dapat memudahkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pelaksanaan program tahunan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan berdaya guna bagi kepentingan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas peternakan dan perikanan;
2. Meningkatnya Populasi Ternak ;
3. Meningkatnya Usaha Perikanan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Adapun program yang ditetapkan kurun waktu Tahun 2022-2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
5. Program pengelolaan Perikanan Budidaya.

Adapun susunan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan pada Periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (output)
I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kepuasan ASN terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
3. Kegiatan Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan atas jasa, sarana dan prasarana kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Populasi Ternak
1. Kegiatan p e n g a w a s a n Penggunaan Sarana Pertanian	Ketersediaan Sarana dan Prasarana
- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelahiran Ternak
- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
III PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet
1 Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Hewan yang divaksin dan diobati
- Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
2 Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pemotong hewan dan pedagang daging dan produk hewan yang diawasi

IV Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap
1 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Perikanan Tangkap
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
V Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan
1 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Usaha Perikanan Budidaya
- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 20 Tahun 2008, Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Untuk selengkapnya indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan kurun waktu Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel T-C. 28

Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Persentase peningkatan populasi ternak (%)	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
1	Jumlah Populasi Ternak (ST)	15.010	17.137	17.370	17.606	17.845	18.088
B	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	5	5	5	5	5	5
1	Jumlah Produksi Ikan (ton)	1.931,5	1196,64	1259,79	1.649,9	1.732,41	1.819,03

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Perikanan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Demikian Perencanaan Strategis ini dibuat untuk bahan dalam Penyempurnaan Program Pembangunan Peternakan dan Perikanan.

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**


**PARIGYA SUNDBAN GAOL, ST
PEMBINA
NIP. 19720314 200312 1 002**

				5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara/jumlah barang milik daerah x 100%	100	177.595,00		100	117.490,00	100	216.665,00	100	223.275,50	100	230.547,05	100	238.545,76	100	1.204.118,31	Disnakkan
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tahun n	1	33.470,00		1	33.470,00	1	38.420,00	1	38.420,00	1	38.420,00	1	38.420,00	1	220.620,00	Disnakkan
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tahun n	20	106.940		17	73.470,00	17	112.140,00	17	112.140,00	17	112.140,00	17	112.140,00	17	628.970,00	Disnakkan
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		20	7.260		15	10.550,00	25	15.660,00	25	17.226,00	25	18.948,60	25	20.843,46	25	90.488,06	Disnakkan
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		3	29.925,00		1	0,00	3	50.445,00	3	55.489,50	3	61.038,45	3	67.142,30	3	264.040,25	Disnakkan
					Meningkatnya Populasi Ternak	Meningkatnya ketersediaan bibit ternak	Jumlah Populasi Ternak	ST (Satuan Ternak)	Jumlah Populasi Ternak Tahun n	14.236	7.783.574,60	15.010	15.214	2.976.482,90	17.370	4.158.950,40	17.606	4.574.845,44	17.845	5.032.329,98	18.088	5.535.562,98	18.088	30.061.746,31	Disnakkan
				1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya Penggunaan Sarana Peternakan	Ketersediaan sarana dan prasarana	item	(Jumlah Sarana Peternakan tahun n-1 / Jumlah sarana peternakan tahun n-1 x 100%)	20	-		20	1.391.101,40	20	808.562,40	20	889.418,64	20	978.360,50	20	1.076.196,55	60	5.143.639,50	Disnakkan
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan		1	-		1	808.562,40	1	889.418,64	1	978.360,50	1	1.076.196,55	5	5.143.639,50	Disnakkan		
				2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Angka Kelahiran Ternak	Jumlah Kelahiran Ternak	ekor	(Jumlah ketersediaan bibit ternak tahun n-1 / Jumlah ketersediaan bibit ternak tahun n-1 x 100%)	1	7.783.574,60		1.000	1.585.381,50	1.000	3.350.388,00		3.685.426,80		4.053.969,00		4.459.366,00		24.918.106,81	Disnakkan
					Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tahun n	1	7.783.574,60		1	1.585.381,50	1	3.350.388,00		3.685.426,80		4.053.969,48		4.459.366,43		24.918.106,81	Disnakkan
					III. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	%	Jumlah Hewan tertangani/terawasi tahun n- Jumlah Hewan tertangani/terawasi tahun n-1 / Jumlah Hewan tertangani/terawasi tahun n	1	783.721,70	1	921.683,90	1	500.000,00	1	600.000,00	1	660.000,00	1	726.000,00	5	4.191.405,60	Disnakkan	
				1	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Hewan yang divaksin dan diobati	%	Jumlah Hewan tertangani/terawasi tahun n	1	783.721,70	9172	1	386.999,90	1	500.000,00	1	600.000,00	1	660.000,00	1	726.000,00	5	3.656.721,60	Disnakkan
					Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terkendali dan Tertanggulangnya Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Tahun n	10	222.790,60		10	386.999,90	10	500.000,00	10	600.000,00	10	660.000,00	10	726.000,00	10	3.095.790,50	Disnakkan



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Jln. Sisingamangaraja Km. 2,2 Kode Pos 22457 Telp. (0633) 31146
E-mail :peternakanhumbahas@gmail.com
DOLOKSANGGUL

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

NOMOR : 22 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 – 2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023;v ccc

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021 - 2026.**
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 - 2026.
- KETIGA** : Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021 - 2026.
- KEEMPAT** : Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021 - 2026 meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Doloksanggul
pada tanggal : 10 Januari 2024

**Ditetapkan di Doloksanggul
Pada tanggal**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



**PARMAN LUMBAN GAOL, ST
PEMBINA
NIP. 19720314 200312 1 002**

Tembusan :

1. Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan maksudnya;
5. Peninggal.

